



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT KERJA KOMISI V DPR RI
DENGAN
MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI RI**

- Tahun Sidang : 2023-2024
Masa Persidangan : I
Rapat Ke- : Ke-3
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Selasa, 29 Agustus 2023
Waktu : Pukul 16.15 s.d. 17.42 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi V DPR RI, (Ruang KK V)
Gedung Nusantara DPR RI
- Ketua Rapat : H. Andi Iwan Darmawan Aras, S.E., M.Si. (F-P.
GERINDRA) – Wakil Ketua Komisi V DPR RI
- Acara : 1. Membahas Laporan Keuangan Pemerintah
Pusat (LKPP) APBN TA 2022;
2. Membahas RKA K/L TA 2024 dalam Nota
Keuangan RAPBN TA 2024;
3. Lain-lain.
- Sekretaris Rapat : Nunik Prihatin Budiastuti, S.H., Kabag Komisi V DPR
RI
- Hadir : A. Anggota DPR RI:
27 dari 55 orang Anggota dengan rincian:
1. FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)
7 dari 12 orang Anggota
 1. Lasarus, S.Sos., M.Si.
 2. Bob Andika Mamana Sitepu, S.H.
 3. Ir. Sudjadi
 4. Sri Rahayu
 5. Ir. Effendi Sianipar
 6. Harvey B. Malaihollo
 7. Djenri Alting Keintjem, SH., M.H.
 2. FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)
3 dari 8 orang Anggota
 1. Drs. Hamka B Kady, M.S.
 2. H. Tubagus Haerul Jaman, S.E.
 3. Muhammad Fauzi, S.E.
 3. FRAKSI PARTAI GERINDRA
(F-GERINDRA)
4 dari 7 orang Anggota

1. H. Andi Iwan Darmawan Aras, S.E., M.Si.
 2. Ir. Sumail Abdullah
 3. Iis Rosyita Dewi, S.Hum., M.M.
 4. Ir. Eddy Santana Putra, M.T.
4. FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM)
1 dari 6 orang Anggota
1. Drs. H. Tamanuri, M.M.
5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)
3 dari 6 orang Anggota
1. H. Ruslan M. Daud, S.E., M.A.P.
 2. H. Dedi Wahidi, S.Pd.
 3. H. An'im Falachudin Mahrus
6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)
3 dari 5 orang Anggota
1. Willem Wandik
 2. Drs. H. Anwar Hafid, M.Si.
 3. Ir. H. Ishak Mekki, M.M.
7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)
3 dari 5 orang Anggota
1. H. Suryadi Jaya Purnama, S.T.
 2. Ir. H. Sigit Sosiantomo
 3. Dr. H. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A.
8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)
2 dari 4 orang Anggota
1. Hj. Hanna Gayatri, S.H.
 2. Mesakh Mirin, SKM.
9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)
1 dari 2 orang Anggota
1. Dr. H. Muh Aras, S.Pd., M.M.

B. UNDANGAN:

1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI (Dr. (H.C.) Drs. H. Abdul Halim Iskandar, M.Pd.) beserta jajaran.

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT /F-P. GERINDRA (H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, S.E., M.Si.):

Hari Selasa 29 Agustus 2023 pukul 16.15 Waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat sore,
Salam sejahtera bagi kita semua,

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI,
Yang terhormat Menteri Desa PDT dan Transmigrasi beserta jajarannya,
serta
Hadirin yang kami hormati,**

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat bertemu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dalam keadaan sehat walafiat.

Menurut laporan dari sekretariat, daftar hadir Anggota Komisi V DPR RI telah ditandatangani sebanyak 20 dari 55 Anggota dan terdiri dari 8 fraksi sehingga telah memenuhi kuorum. Oleh karena itu, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 281 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, izinkanlah kami membuka rapat pada hari ini dan sesuai ketentuan Pasal 276 ayat (1) rapat kerja ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 16.15 WIB)

Terima kasih kepada Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi beserta jajarannya yang telah memenuhi undangan kami pada hari ini untuk membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN Tahun Anggaran 2022 dan RKA K/L dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2024.

**Pimpinan,
Anggota Komisi V DPR RI, dan
Menteri Desa PDT dan Transmigrasi yang kami hormati,**

Menindaklanjuti surat dari Pimpinan Banggar DPR RI Tanggal 12 Juli 2023 perihal Penyampaian Rancangan Jadwal Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Jadwal Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2024 maka hari ini Komisi V DPR RI melaksanakan rapat kerja dengan mitra kerjanya dengan agenda membahas LKPP APBN Tahun Anggaran 2022 dan RKA K/L dengan Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2024 Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPP Tahun 2022, Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi mendapatkan opini Wajar

Tanpa Pengecualian (WTP) terkait dengan agenda pembahasan RKA K/L dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2024. Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi memperoleh anggaran sebesar Rp2,75 triliun. Komposisi anggaran tersebut digunakan untuk program dukungan manajemen dan untuk program daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pedesaan dan transmigrasi.

Dalam kesempatan Raker ini, perlu kiranya kita bangun kesepahaman bersama bahwa rapat kerja pada hari ini merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2024 yang telah kita laksanakan pada bulan Juni 2023 lalu. Selain itu, sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan bahwa tugas komisi dalam bidang anggaran meliputi: membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja komisi dan mengadakan pembahasan laporan keuangan negara dan pelaksanaan APBN.

Oleh karena itu, pada Raker hari ini, Komisi V DPR RI hendak mendapatkan penjelasan dari Menteri Desa PDT dan Transmigrasi terkait dengan LKPP APBN Tahun Anggaran 2022 dan RKA K/L dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2024.

Saudara-Saudara yang berbahagia,

Demikian pengantar dari kami.

Selanjutnya kepada Menteri Desa PDT dan Transmigrasi, kami serahkan untuk menyampaikan penjelasannya. Kami persilakan Pak Menteri.

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI (Dr. (H.C.) Drs. H. ABDUL HALIM ISKANDAR, M.Pd):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat sore, dan

Salam sejahtera untuk kita semua,

Shalom,

Om swastiastu,

Namo buddhaya,

Salam kebajikan.

Yang kita hormati Pimpinan Rapat beserta seluruh Anggota Komisi V DPR RI,

Kami ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Sebagaimana undangan yang diberikan kepada kami ada dua hal yang akan kita laporkan pada kesempatan rapat kerja kali ini.

Yang pertama membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/LKPP APBN Tahun Anggaran 2022. Kemudian yang kedua membahas Rencana Kerja Anggaran Tahun 2024.

**Bapak-Ibu sekalian,
Para Pimpinan dan Anggota Komisi V yang saya hormati,**

Kita awali pada Laporan Keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Ada tiga hal: yang Pertama, laporan keuangan tahun 2022 itu terdiri atas pelaporan realisasi anggaran, kemudian neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas. Keseluruh hal itu sudah dilakukan pemeriksaan oleh BPK berkenaan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Kepatuhan terhadap undang-undang.

Alhamdulillah, berkat pengawasan, dukungan, dan arahan dari Pimpinan dan Anggota Komisi V, hasil pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2022 Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Ini berarti sudah untuk yang ke-7 kalinya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Para Pimpinan dan Anggota Komisi V yang saya hormati, utamanya Ketua Rapat,

Terkait dengan laporan realisasi anggaran, dapat kita laporkan bahwa realisasi penerimaan bukan pajak sebagian besar dari penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu yang merupakan pengembalian atas temuan BPK pada tahun sebelumnya dan pendapatan atas sewa gedung di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Jadi angka besar ini karena ada pengembalian dan memang kita dua tahun terakhir ini terus melakukan ikhtiar-ikhtiar agar tunggakan-tunggakan laporan hasil pemeriksaan temuan dari tahun ke tahun yang sudah lewat, kita selesaikan karena kita kepingin pada akhir periode pemerintahan Pak Jokowi ini banyak hal yang bisa kita selesaikan makanya ada kenaikan yang cukup signifikan.

Terdapat kenaikan belanja pegawai yang tidak signifikan antara Tahun Anggaran 2022 dan 2021. Kenaikan tersebut disebabkan akun belanja lembur yang naik dibanding Tahun Anggaran 2021 dengan adanya kebijakan WFO 100% pada Tahun Anggaran 2022. Kemudian catatan yang ketiga terdapat penurunan realisasi belanja barang yang tidak signifikan antara 2022 dan Tahun Anggaran 2021. Penurunan realisasi dikarenakan turunnya anggaran belanja barang dari kebijakan *pragmatic adjustment*, juga terdapat penurunan realisasi belanja modal yang signifikan tahun 2022 dan tahun 2021. Penurunan realisasi dikarenakan turunnya anggaran belanja modal dari kebijakan *automatic adjustment*.

Kemudian yang kedua terkait dengan neraca per 31 Desember 2022 dan 2021 untuk pembandingan. Aset lancar terdiri dari kas piutang bukan pajak dan persediaan. Terjadi kenaikan aset lancar pada pos persediaan diserahkan kepada masyarakat dikarenakan pada Tahun Anggaran 2022 masih dalam proses penyerahan atau hibah kepada masyarakat. Aset tetap terdiri atas tanah, peralatan mesin, gedung bangunan, jalan irigasi jaringan, konstruksi dalam pengerjaan, terjadi penurunan aset tetap namun tidak signifikan karena adanya transfer keluar, hibah keluar, penghapusan atas aset yang kondisi rusak atau rusak berat.

Kemudian piutang jangka panjang pada tahun 2021 merupakan piutang tuntutan ganti rugi yang sudah dilunasi pada tahun 2022. Aset lainnya terdiri atas aset tak berwujud, *software*, dan aset yang dihentikan dari penggunaan operasional. Terjadi penurunan aset lainnya karena adanya penghapusan, hibah keluar, dan transfer keluar.

Total aset pada tahun 2022 menurun dari tahun 2021 sebesar 6,65% karena adanya penghapusan aset, hibah keluar, dan transfer keluar. Kewajiban jangka pendek terdiri dari utang kepada pihak ketiga dan pendapatan diterima dimuka. Terjadi kenaikan utang kepada pihak ketiga karena pengakuan akuntansi atas belanja pegawai bulan Desember 2022 yang lalu dibayar menggunakan anggaran 2023, jadi hanya berbeda pada realisasinya.

Ekuitas jumlah aset dikurangi jumlah kewajiban. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

**Pak Ketua Rapat,
Para Anggota Komisi V yang saya hormati,**

Selanjutnya, kita laporkan laporan operasional tahun 2022, 2021 yang merupakan laporan yang menyajikan kegiatan operasional berbasis *equal*. Pendapatan terdapat kenaikan pendapatan negara bukan pajak tahun 2022 dibanding 2021. Beban operasional terdapat kenaikan beban pegawai namun tidak signifikan dibanding tahun 2021. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksud untuk mempertahankan aset yang sudah ada dalam kondisi normal. Terdapat kenaikan beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat Tahun Anggaran 2022. Proses hibah kepada masyarakat lebih banyak selesai dibanding Tahun Anggaran 2021 ada percepatan.

Terdapat penurunan beban penyisihan piutang tak tertagih dikarenakan berkurangnya jumlah piutang sehingga beban penyisihan piutang mengikuti persentase jumlah piutang. Laporan operasional tahun 2022 mengalami kenaikan defisit karena kenaikan beban operasional khususnya beban barang dan jasa yang cukup signifikan.

Ketua Rapat, Pimpinan, dan Anggota Komisi V yang saya hormati,

Selanjutnya, laporan perubahan ekuitas sebagaimana sudah kita laporkan tadi terdapat penurunan ekuitas akhir sebesar 7,135% dibanding tahun 2021. Kemudian dari total semua itu ekuitas yang merupakan kewajiban kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban, tadi juga sudah kita singgung di depan.

Pak Ketua dan para Anggota Komisi V yang saya hormati,

Selanjutnya, kami laporkan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Tahun Anggaran 2024 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berdasarkan Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2024. Sebagaimana kita maklumi bahwa tema dan arah kebijakan RKP 2024 mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kemudian pagu dan realisasi untuk referensi saja 2022, kita pada posisi 96,46% naik dibanding 2021. Sedangkan secara akumulatif realisasi 2015 sampai 2022 rata-rata ada pada posisi 83,73%. Sedangkan untuk pagu anggaran tahun 2024 sebagaimana sudah pernah kita laporkan juga, pagu indikatif rupiah murni sebesar 2.419.714.213.000, kemudian pinjaman luar negeri tiga ratus tiga puluh empat miliar lima ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh sembilan, dan hibah luar negeri sebesar 3 miliar. Total *dua triliun tujuh ratus lima puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh tiga* sedangkan, itu pagu indikatif.

Kemudian pagu anggaran tahun 2024 ada sedikit perbedaan, sedikit sekali, kemudian pada pemutakhiran pagu anggaran sesuai kesepakatan *trilateral meeting* dan penelaahan pagu anggaran tahun 2024 naik sedikit menjadi *dua koma tujuh lima tujuh dua enam delapan oh nggak* persis dengan pagu indikatif cuma posisi penempatannya agak berbeda sedikit antara program dukungan manajemen dengan program daerah tertinggal kawasan perbatasan, pedesaan, dan transmigrasi. Jadi selisihnya perbedaannya di situ tapi totalnya sama.

Kemudian untuk rincian PHLN dan PNPB Tahun 2024. Pinjaman dan hibah luar negeri untuk transformasi ekonomi Kampung Terpadu TEKAD ini untuk Indonesia Timur. Kemudian program penguatan pemerintah dan pembangunan desa dari World Bank total 337.554.169.000. Sedangkan proyeksi penerimaan negara bukan pajak ada kita proyeksikan 1 miliar 544 juta. Rincian masing-masing UK-1 sebagaimana sudah kita sampaikan juga dalam bahan ini dan yang terpenting adalah *breakdown* dari seluruh anggaran tadi dalam *output* prioritas Sarpras desa wisata dan seterusnya yang juga merupakan lampiran tak terpisahkan yang menurut saya ini membutuhkan pendalaman dan arahan dari para Pimpinan dan Anggota Komisi V yang saya hormati.

Saya pikir demikian, Pak Ketua, yang bisa kami laporkan. Kurang lebihnya mohon maaf.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Menteri.

Selanjutnya, kami akan mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk memberikan pertanyaan dan pendalaman. Dan untuk kesempatan pertama akan kami serahkan kepada Bapak Djenri Alting Keintjem, silakan Pak.

F-PDIP (DJENRI ALTING KEINTJEM, SH, MH):

Terima kasih.

**Pimpinan Sidang,
Pak Menteri beserta jajaran,
Teman-teman Komisi V,**

Kami mengikuti pemaparan ini memang bukan berarti mendapat WTP kemudian tidak ada catatan di dalam, Pak, Pak ada. Saya mencontohkan sebenarnya tadi di Basarnas, mereka kan WTP tapi Pimpinan Basarnas nya tadi *nggak* ada di mana mungkin. Itu contoh, contoh yang tidak bisa kita abaikan. Jadi mudah-mudahan catatan-catatan tersebut walaupun ini sudah ada di Sidang Paripurna karena saya mengikuti Sidang Paripurna, catatan kita di Komisi V, Pak Pimpinan hanya ada di PUPR, salah satu fraksi mempertanyakan itu. Dan catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan walaupun DPR nya yang sudah 78 tahun hari ini, WTP juga sudah beberapa kali mendapat predikat ini yang orang bilang itu prestasi, yang mereka katakan prestasi.

Demikian juga dengan kementerian dan lembaga ini. Mereka bilang kalau dapat Wajar Tanpa Pengecualian prestasi. Saya bilang bukan prestasi itu memang kewajiban kerja seperti itu. Ya, justru kalau tidak mendapat WTP berarti ada hal-hal yang perlu diperbaiki lagi dalam, itu bukan prestasi tapi memang kewajiban dari setiap lembaga karena ini mengelola uang rakyat, uang negara. Tapi biar bagaimanapun kami sebagai mitra dari kementerian ini tentunya mengapresiasi karena kalau kita di daerah kebetulan kita kan belum lama pulang reses. Ada yang mengatakan begini kalau di kampung, saya orang kampung, Pak. Mungkin orang-orang yang tersangkut masalah ada dugaan korupsi yang bermitra dengan Komisi V, sebenarnya fungsinya Komisi V apa? kita bilang kan kita sebenarnya fungsinya semua sama di komisi ada tiga. Salah satunya pengawasan. Apakah fungsi pengawasan di Komisi V itu tidak jalan sehingga mitra-mitra di Komisi V itu banyak terjerat dengan masalah-masalah hukum *gitu*, apakah fungsi pengawasan kami tidak berjalan? sebenarnya ada tapi tidak sedetail sampai ke dalam apalagi kalau kita bilang mengelola keuangan negara yang sangat besar seperti di Kementerian PUPR itu sangat besar anggaran yang dikelola. Kita tidak bisa mengawasi satu

persatu. Kita saja mau mendekati salah satu apa bidang sudah dicurigai macam-macam itu Komisi V.

Tapi di Kementerian Bapak ini memang bukan karena kami tidak *care* tapi seperti yang saya dorong terus, anggaran di kementerian ini perlu ditambah terus ya karena Ibu Menteri Keuangan mengatakan tadi Rapat Paripurna salah satu tujuan kita salah satu anggaran besar yang dikeluarkan oleh negara untuk tahun 2024 adalah pengentasan kemiskinan yang absolut dan itu banyak berhubungan dengan kementerian Bapak apalagi masih pakai PDT dan Transmigrasi, desa tertinggal dan segala macam yang saya bilang dulu sebenarnya kita (*suara kurang jelas*) tahun merdeka ini masih pakai desa tertinggal-desa tertinggal sehingga yang pasti anggarannya itu akan banyak. Tetapi mudah-mudahan di tahun 2024, saya tidak berhenti-berhenti memperjuangkan seperti yang disampaikan oleh salah satu fraksi di pandangan di pemandangannya beberapa hari yang lalu. Kita dorong terus kementerian ini untuk ditambah anggarannya, karena kalau cuma seperti ini tidak sampai 3 triliun beda sedikit dengan BMKG tadi sebenarnya dari sisi, bukan saya mengatakan tidak penting BMKG nya itu Tapi kalau memang kita mengentaskan kemiskinan kan kemiskinan itu banyak ada di desa-desa sehingga harus ditambah.

Yang kedua, Pak. Saya tidak juga berhenti agar supaya saya tidak terlalu mohon maaf jabatan Kepala Desa itu yang sudah jadi 9 tahun sudah jadi kan, Pak, atau belum? belum ya. Saya berjuang terus bagaimana Kepala Desa itu walaupun dia 25 tahun kita ketuk di DPR RI tapi kehidupan para perangkat desa dan kepala desanya seperti ini seperti sekarang ini mereka juga butuh makan, butuh hidup, butuh sejahtera seperti kita-kita sehingga saya terus memperjuangkan.

Saya mendukung apa yang disampaikan oleh salah satu fraksi di pandangan umumnya kalau perlu dana desanya dikasih 5 miliar per tahun, sekarang kan paling banyak 1 miliar ya walaupun memang ada yang mengatakan begini memang uangnya mau ambil di mana. Ya, kita ngutang terus *kok* negara mengutang terus, nggak apa-apa kalau untuk pembangunan apalagi untuk desa *ndak* apa-apa menghutang yang penting itu jelas peruntukannya. Ya, sehingga saya dukung terus agar supaya anggaran untuk para kepala desa dan perangkatnya itu harus ditingkatkan, *ntah* mereka mau menjabat 9 tahun, 6 tahun, 7 tahun atau 20 tahun tapi kesejahteraan mereka harus dimasukkan dan harus ada tanggung jawab dari negara lewat APBN.

Mungkin itu yang perlu saya sampaikan Bapak Pimpinan dan Menteri serta jajarannya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya kami dipersilakan ke Pak Dr. Aras.

F-PPP (Dr. H. MUH. ARAS, S.Pd., M.M.):

Terima kasih, Pimpinan.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat sore, dan

Salam sejahtera untuk kita semua.

**Yang terhormat Pimpinan dan kawan-kawan Anggota Komisi V,
Yang saya hormati Pak Menteri, Pak Sekjen, dan seluruh jajaran, dan
Hadirin yang sangat berbahagia,**

Apresiasi kami sampaikan dari paparan Pak Menteri yang singkat, jelas, dan anggarannya masih terbatas. Hanya ada dua yang ingin saya tanggapi di dalam *output* prioritas. Di sini dijelaskan Sarpras desa wisata itu hanya 36 titik yang jumlahnya hanya 24,4 miliar. Ini tidak mampu untuk mengangkat apa namanya desa-desa yang tertinggal di negeri kita kalau hanya 36 desa maka kita tahu bahwa *tagline* Kementerian Desa kan membangun dari desa. Tentu ini harus diperbesar volumenya, Pak Menteri, agar ini tentu kita harapkan bahwa wisata-wisata desa di daerah betul-betul bisa memberikan *benefit* bagi perkembangan desa di daerah tersebut apalagi kita tahu bahwa desa kita di negeri ini masih cukup banyak yang tertinggal dari 74.000 masih sangat banyak ya.

Yang kedua, juga untuk stimulan terhadap BUMDes juga hanya 200 BUMDes yang totalnya hanya 19 miliar. Ini mohon dipertimbangkan untuk menambah alokasi anggaran di sana agar paling tidak usaha-usaha desa ini betul-betul bisa berkembang sehingga masyarakat di desa ini juga bisa menikmati perputaran uang yang lancar.

Barangkali itu saja, Pak Menteri.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Singkat, jelas, BUMDes tambah.

Selanjutnya, Ibu Sri Rahayu, silakan Bu.

F-PDIP (SRI RAHAYU):

Pindah dulu, Ketua.

Terima kasih Ketua

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

**Yang saya hormati Ketua atau Pimpinan Komisi V,
Yang saya hormati Pak Menteri dan seluruh jajaran Kementerian Desa dan
PDTT,**

Saya langsung saja.

Tadi disampaikan Pak Aras bahwa BUMDes ini memang dibutuhkan untuk *support*. Tetapi kalau saya perhatikan anggarannya sedikit sekarang, *nggak* tahu kenapa ini *kok* turun ya, Pak, anggarannya *nih* untuk BUMDes. Oleh karena itu, mungkin ini perlu mendapatkan perhatian perlu ditambah anggarannya.

Kemudian yang kedua terkait dengan desa wisata. Terlepas dari apapun, desa wisata ini menurut saya menjadi sesuatu yang bagus hasilnya karena masyarakat mulai menggeliat untuk hal itu sehingga perputaran perekonomian itu menjadi di desa tersebut. Dan kalau saya perhatikan, apakah itu desa tertinggal atau desa maju itu punya keinginan yang sama untuk membangun desanya terutama tujuan wisata ini menjadi salah satu faktor penting dalam menggerakkan perekonomian. Oleh karena itu, kalau saya tadi melihat langsung anggarannya *kok* cuma... cuma berapa itu berapa desa gitu ya 36 hanya 36, kemudian pasar saja juga hanya 6, 6 unit pasar, ini perlu. Maksud saya, hal-hal yang memang maksudnya anggarannya sedikit jangan ngisi istilahnya *wong jowo ojo diecer-ecer gitu loh*. Maksud saya mana yang semuanya mesti dianggap prioritas ini apa yang di ini *output-nya outcome-nya* itu dianggap prioritas semua tetapi kita kan bisa memilah-milah mana yang perlu ditingkatkan dalam rangka untuk pengembangan desa yang katanya menginginkan desa ini menjadi maju semua kan begitu dan desa menjadi salah satu faktor kalau kita kemudian Indonesia ini maju atau tidak. Mungkin Pak Halim kurang kenceng kali ya di kementeriannya. Yang kenceng Pak Halim biar dapat anggaran tambahan begitu.

Kemudian seperti misalnya ada *output-nya* Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Di sini ada anggaran 2,8 miliar prasarana air bersih di daerah tertinggal, kemudian selanjutnya ditindaklanjuti dengan sarana air bersih yang dibangun di kawasan perbatasan 1,7 miliar. Maksud saya, prasarana ini ini mungkin langsung saya tanya ke ini nya ya Pak kan, apakah ini hanya artinya kita bikin, bikin apa semacam sumur bor nya sumur bor kemudian selesai atau seluruh fasilitasnya termasuk ke masyarakat itu juga akan dibangun di daerah itu. Kalau iya, ini diperuntukkan kepada berapa, saya *nggak* ngerti ini yang dimaksud dengan prasarana air bersih ini daerah tertinggal berapa KK mungkin ya, berapa KK untuk daerah itu.

Demikian juga sarana air bersih yang dibangun di kawasan perbatasan, ini kira-kira kan juga sama di Alor ini. Alor itu pulau mana ya, Pak, ya di? Di NTT ya. Kalau perlu meskipun begini ini kan kita perlu kunjungan ya perlu melihat di lapangan untuk apakah suatu saat dengan anggaran ini apa yang dibutuhkan begitu berikutnya supaya anggaran ataupun yang dibangun ini tidak

terputus sehingga masyarakat ini memang betul-betul memanfaatkan apa yang direncanakan oleh kementerian.

Kemudian selanjutnya terkait dengan ini apa hutan sosial. Hutan sosial itu kan ada peningkatan kapasitas kelompok masyarakat, kemudian budidaya lahan, kemudian ada lagi *pilot project* sarana pengembangan perhutanan. Ini ada *nggak* merupakan satu kesatuan atau berdiri sendiri ini? maksudnya ketika membuat anggaran ini, *oh*, di sana ada sendiri mau membuat hutan di sini ada sendiri kemudian di sana sendiri atau itu merupakan satu kesatuan yang dibangun sarana atau *pilot project*-nya kemudian juga ada peningkatan kelompoknya dan seterusnya.

Kenapa ini saya tanyakan, kalau ini ini menjadi satu kesatuan itu kan penilaiannya gampang, menilainya lebih mudah melihatnya lebih mudah. *Oh*, ini ada *pilot project* kemudian setelah itu di situ di hutan sosial ini ada kelompok-kelompok sumber daya manusianya yang ditingkatkan, kemudian di situ diberikan pekerjaan ataupun ada untuk ekonominya memberikan budidaya lahan dalam mendukung pengembangan pertanian dan seterusnya. Ini kira-kira apakah berdiri sendiri-sendiri tempatnya. Kalau saya lihat tempatnya ini kan sama ya yang yang 1, 2 ini 3 ini kan. Apakah ini satu titik begitu kemudian ini atau sendiri-sendiri? Mohon saya diberikan penjelasan.

Kemudian yang transmigrasi. Sekali lagi saya selalu ingin bahwa transmigrasi ini betul-betul dikelola di-*manage* dengan baik sehingga menjadi satu kota mandiri ya namanya apa kota mandiri ya, Pak, ya kalau transmigrasi itu. Itu menjadi memang betul-betul kota yang tidak memindahkan kemiskinan tetapi memang memindahkan orang kemudian dikelola di-*manage* dan itu akan peningkatan penghidupan orang-orang yang ada di sana. Oleh karena itu, hal-hal yang terkait dengan transmigrasi, mohon betul-betul apa ya dikaji mana yang betul-betul harus segera dituntaskan, mana yang bisa ditunda. Karena memang menurut saya transmigrasi ini menjadi sesuatu yang sangat perlu diperhatikan, karena sekali lagi ada yang di Lampung yang memang kurang karena tidak adanya anggaran sehingga itu akhirnya tempat-tempat itu tidak menjadi sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat. Jangan sampai sekali lagi mereka sudah transmigrasi tetapi mereka akan kembali dengan segala kemiskinan yang sudah terlanjur dibawa ke sana kemudian pulang-pulang malah menimbulkan kemiskinan baru bahkan tidak punya tanah, tidak punya rumah sehingga ada persoalan-persoalan baru termasuk mungkin jalan-jalan dan seterusnya atau fasilitas-fasilitas lain yang memang.

Memang kita diberikan contoh pernah melakukan kunjungan di tempat transmigrasi yang dianggap berhasil tetapi juga ada tempat-tempat yang memang perlu mendapatkan perhatian. Sekali lagi Bapak, saya mohon dengan hormat di Lampung juga perlu di Lampung itu di Tulang Bawang, kemudian di Kaltara, di Bulungan ya, Pak, ya itu juga perlu mendapatkan perhatian karena daerahnya sulit untuk dijangkau sehingga perlu fasilitas-fasilitas yang memang dibutuhkan oleh masyarakat oleh para transmigran yang ada di sana dan kalau saya lihat daerah tanah sekelilingnya itu memang pengolahannya untuk kehidupan mereka ke depan itu juga perlu mendapatkan perhatian. Kalau

persoalan tanah itu penting tetapi kan itu administratif artinya tidak dihadapi hari-hari untuk hidup gitu maksud saya, tetapi yang dibutuhkan kan hari-hari untuk hidup mereka dan jumlahnya juga cukup lumayan gitu.

Saya kira itu yang ingin saya sampaikan dan apresiasi kepada Kementerian Desa yang telah mendapatkan Wajar, ya Pak, tanpa WTP ya Pak ya. Mudah-mudahan ke depan tahun 2023 juga akan mendapatkan hal yang sama.

Demikian.

Terima kasih, Pak Ketua. Saya akhiri

*Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Ibu Sri Rahayu.

Selanjutnya kami persilakan ke Ibu Cen Sui Lan. Hari ini bajunya hijau biasanya kuning.

F-P. GOLKAR (CEN SUI LAN):

Terima kasih Pimpinan, Pimpinan *the best*

**Yang saya hormati Pimpinan dan teman-teman Komisi V,
Yang saya hormati Pak Menteri dan jajaran ada Pak Sekjen dan Pak Kabiro
ya dan semua jajaran,**

Pertama, Pak Menteri, saya ucapkan terima kasih karena kemarin saya minta dibantu untuk diadakan acara berlangsung dengan sukses. Jadi terima kasih, Pak Menteri.

Yang kedua, Pak Menteri. Kemarin waktu kita pelatihan untuk BUMDes, para BUMDes, para kepala desa sangat antusias, antusias sekali dan tentunya dengan harapan tahun depan itu bisa mendapat bantuan BUMDes dan desa wisata. Dan kita lihat setiap tahun ini anggaran Pak Menteri ini kan sekitar di 2 sampai 3, tahun ini di 2,9. Dan teman-teman itu mendapat juga BUMDes dan desa wisata yang cukup, tahun depan mungkin hanya selisih 200 tetapi yang kita lihat di pemaparan, Pak Menteri, desa wisata tinggal 36. Jadi 36 itu kalau mau dibagi kita masing-masing *nggak* cukup berebut, malu. Kalau saya tetap dapat karena Dapil Kepri tetap 1.

Nah, yang kita harapkan Pak Menteri, kalau tahun ini bisa seperti itu, tahun depan tentunya bisa, karena apa? kan tidak ada perubahan tinggal bagaimana Pak Menteri mengaturnya. Jadi melanjutkan yang teman-teman sampaikan, mungkin bisa diatur kembali lagi seperti sekarang karena kita mau

setiap desa kita mendapat bantuan yang bagus untuk menjadi desa yang lebih bagus.

Mungkin itu saja, Pak Menteri, itu aja, Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Bu Cen Sui Lan.

Saya baru sadar pakai baju hijau mungkin karena Pak Menteri yang hadir di sini, takutnya DCT pindah, Pak, ya.

Yang selanjutnya kami persilakan ke yang hari ini ganteng sekali Pak Syahrul Aidi Maazat. Jasnya mantap banget, Pak,

F-PKS (Dr. H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, L.c., M.A.):

Baik.

Terima kasih, Pimpinan.

**Pimpinan dan Anggota Komisi V yang saya hormati,
Pak Menteri, Pak Sekjen, dan seluruh pejabat di lingkungan Kementerian
Desa,**

Selamat kepada Kementerian Desa, Wakil Menterinya jadi Menteri. Wakil Menterinya jadi Menteri ATR/BPN ya, Menterinya jadi Wapres nampaknya. Eh Menkominfo *sorry-sorry*.

Baik.

Pak Menteri, selalu menarik ini untuk membahas tentang desa. Kebetulan saya masih tinggal di desa *nih*, Pak Menteri. Pertama, mudah-mudahan Pak Menteri sudah mempersiapkan masalah peraturan kementerian untuk penggunaan dana desa 2024. Ini janji kita kemarin agar itu dibawa ke Komisi V untuk kita diskusikan sehingga teman-teman kepala desa tidak ngadu ke kita tapi barang itu sudah jadi gitu. Jadi kemudian berharap agar peraturan ke depan itu adalah sesuai dengan aspirasi teman-teman kepala desa yang mereka sampaikan juga kemudian kemarin ditampung dalam Rancangan Revisi Undang-Undang Desa.

Kebetulan saya kemarin di menjadi Anggota Panja, Anggota Panja Revisi Undang-Undang Desa untuk dijadikan inisiatif DPR RI. Saya tidak tahu katanya diupayakan untuk diketuk palu di tahun ini, *nah* mudah-mudahan saja. Selain dari masa jabatan menjadi 9 tahun, ada isu-isu krusial yang menjadi harus menjadi konsen kita harus dipersiapkan juga aturannya dari sekarang. Ini tidak harus menunggu apa namanya menunggu ketuk palu penetapan RUU nya. *Nah*, itu tentang kemandirian desa, Pak, kemandirian desa dalam

mengelola dana desanya. Yang dimaksud di sini adalah silakan kementerian ini yang pusat pemerintah pusat untuk membuat program-program tapi jangan dipatok persentasenya, ini yang selalu kita diskusikan.

Silakan bahwasanya misalnya dana desa ini bisa digunakan untuk ketahanan pangan, bisa digunakan untuk apa, tapi jangan pernah dipatok dibuat 20% persen dulu, kemudian 40% dulu, 25% gitu. Saya setuju, Pak, bahwasanya, supaya apa? karena masing-masing desa punya karakter yang beda-beda, Pak. *Nah*, kalau kita lihat Kementerian Desa ini kan sebetulnya kalau dilihat anggaran di sini kan kecil, cuma kita membangun desa itu kan dengan dana desa yang kita kucurkan dan kita ingin dana yang kita kucurkan yang hampir 70 triliun itu adalah memang betul-betul bisa mengangkat desa-desa kita itu menjadi desa-desa yang maju, desa mandiri, dan itu tentunya gawenya adalah Kementerian Desa.

Nah, maka dia akan berefek kalau memang sesuai dengan kebutuhannya, Pak. *Nah*, saya contohkan kemarin. Kita membuat aturan ketahanan pangan ya, ada, Pak, desa, Pak, ketahanan pangan itu dana untuk ketahanan pangan itu adalah dengan cara membeli ayam 1 ekor ayam dikasih setiap rumah 1 ekor ayam. Saya bingung *nggak* bisa mencerna itu ketahanan pangan itu apa maksudnya. Kalau dengan cara membeli ayam gimana *nih* pendamping desa mentafsirkan, itu menjadi konsumtif jadinya. Kemudian tidak ada ketahanan pangan berarti beli ayam kasih dimasak, kalau satu ayam mana bisa dipelihara.

Nah, jadi maksud saya, Pak, sebetulnya kalau kita lihat di bawah masyarakat *nggak* butuh itu. Jadi silakan nanti dibuat programnya tapi jangan kapok harus desa ini melakukan ini. Maka selalu saya sampaikan kemarin juga pas kami membahas RUU itu, ada desa yang sesungguhnya ketahanan pangannya sudah bagus, Pak, *nggak* perlu lagi mereka karena itu adalah sudah lumbung pangan *nggak* harus lagi mereka harus mendorongnya melalui dana desanya, sudah bagus ketahanan pangannya.

Kemudian banyak desa-desa itu masalah infrastrukturnya sangat butuh sekali, Pak. Saya ke Inhil Kabupaten Inhil itu, Pak, itu butuh jembatan, butuh jalan, semenisasi, itu parah sekali, Pak, itu masih banyak desa yang tidak masuk mobil, Pak, masih banyak desa yang jalannya itu pakai tumpuk kelapa-kelapa tidak bisa disemenisasi, kenapa? karena dana desanya terkuras untuk yang tadi di patok-patok persentase itu. *Nah*, jadi mohon ke depan 2024 tidak ada lagi dipatok persentasenya dibuat minimal sekian, maksimal sekian.

Kemudian yang kedua, saya usul juga itu kemarin pembelian lahan, Pak, kalau bisa di lahan persawahan khususnya lahan sawah. Jadi begini ada kasus. Ini kan menurut aturan kita sawah yang ada itu tidak boleh dialihfungsikan. *Nah*, sawah ini pemiliknya dulu petani tetapi sekarang keturunannya tidak ada lagi jadi petani, Pak, akhirnya sawah itu nganggur. Sementara ada orang miskin di desa itu tidak punya lahan. Dan yang perlu menjadi catatan kita bahwasanya tidak semua desa punya lahan, Pak, ada desa itu tidak punya lahan, hanya lahannya *tok* yang ada di kantor desa saja.

Nah, saya berpikir adalah kalau orientasi kita memberdayakan dan mengangkat masyarakat miskin yang ada di desa, bagaimana caranya? desa punya lahan silakan nanti yang bercocok tanam, yang menanam sayur-sayuran atau padi itu adalah masyarakat yang ada di desa, masyarakat miskin yang ada di desa. Lahannya apa? lahan desa. Nanti biayanya dari mana? Dari BUMDes. Bantuan itu masuk ke mereka. Sekarang itu masyarakat miskin yang ada di desa itu jadi buruh, Pak, bukan jadi petani. Akhirnya kalau mereka jadi buruh, subsidi itu tidak masuk ke mereka, Pak. Subsidi pupuk, subsidi bibit, itu masuknya kepada pemilik modal. Mereka jadi buruh mendapat upah.

Nah, saya berpikir bagaimana apakah nanti dibatasi untuk lahan pertanian agar lahan pertanian kita ini tidak dialihfungsikan, Pak, dan lahan yang tidur lahan pertanian itu memang berfungsi. Desa yang ah ini baru kita katakan ketahanan pangan, Pak, jadi tidak ada istilah lahan pertanian kita yang tidur tetapi itu bisa difungsikan punya instrumennya *kok*. Lahannya punya desa, modalnya melalui BUMDes, petaninya adalah masyarakat miskin yang ada di desa itu.

Kemudian saya ingin tanya, Pak. Dalam SDGs Bapak itu luar biasa, Pak. Di antara yang luar biasa itu adalah desa tanpa kelaparan. *Nah*, cuma saya melihat ada desa *eh* ada masyarakat itu kadang-kadang laparnya itu tidak terencana, Pak. *Nah*, ini kan *ndak* mungkin untuk kasus seperti ini kita buat perencanaan harus menjadi gelondongan dulu gitu ya maksudnya berapa. *Nah*, berarti harus ada dana tanggap darurat yang memang khususnya adalah untuk menangani masyarakat-masyarakat miskin.

Nah, saya setuju, Pak, kalau masih ada BLT untuk desa tapi saya setuju untuk mengatasi kelaparan seperti ini, tapi itu khusus untuk masyarakat miskin yang tidak bisa bekerja, miskin yang cacat, yang tidak tertampung melalui DTKS. Ini kalau bisa nanti masih ada BLT, saya setuju, Pak, tapi khusus untuk yang memang masyarakat miskin yang tak mampu bekerja. Mohon maaf contoh dia miskin, dia cacat dan cacatnya itu tidak mampu bekerja. Yang kedua, dia miskin dia sakit menahun contohnya apa? stroke, kencing manis, yang sudah kakinya sudah diamputasi, ini orang tidak mampu bekerja lagi ini saya cocok itu. *Nah*, contohnya lagi apa? dia miskin, dia tua renta, dan tidak masuk dalam data DTKS atau PKH kita. Saya setuju kalau itu bisa dimasukkan BLT tapi buat kategorinya dan bahasa Al-Qurannya ya bahasa agamanya *fuqoro* gitu. *Fuqoro* itu adalah orang yang tulang punggungnya ini patah, *fuqoro* itu asal katanya *faqor*, *faqor* itu tulang punggung, tulang punggungnya patah.

Kemudian dua, desa... *nah* ini, Pak. Saya selalu bertanya ini dan kalau bisa Pak Menteri masih menjadi Menteri *eh* kalau Pak Menteri masih lanjut nanti Menteri Desa lagi saya usul, Pak. Dana Bapak inikan sangat kecil sekali ya 3 triliun tapi yang mau dikelola tiga, tiga apa ya pembangunan desa, pembangunan daerah tertinggal, pembangunan transmigrasi. Usul saya cukup saja pembangunan daerah tertinggal itu serahkan sama Kementerian PU, Pak, karena dia besar kan wilayahnya besar, wilayah yang mau dibangun oleh Kementerian Desa anggarannya 3 triliun programnya satu titik hanya 1 miliar.

Nah, harusnya kan Kementerian Desa ini adalah Kementerian Desa itu saja. *Nah*, baru nanti fokus kepada desa yang tertinggal dan sangat tertinggal.

Sudah berapa tahun saya bertanya belum terjawab-jawab juga, mudah-mudahan bisa terjawab ini. Apa program untuk desa sangat tertinggal dan tertinggal? saya tidak menemukan ini, ini khusus untuk desa sangat tertinggal dan tertinggal yang tidak masuk dalam wilayah daerah tertinggal. Ini kalau diurut-urut *nih*, Pak, ini yang paling wajib dulu sebelum kita membahas kemajuan kemandirian.

Nah, itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Menteri, saya apresiasi Kementerian Desa kembali mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian. Dan pesan terakhir, Pak, bukan pesan maksudnya dalam rapat ini ya, kalau ada teman-teman dari Kementerian Desa ini turun untuk program-program apalagi yang menjadi aspirasi kami ya kasih tahu lah ke apa namanya kami begitu, staf kami, atau ke kami langsung, silakan saja: "Pak, kami turun", kita cocokkanlah turunnya, jangan pula nanti kita yang bawa aspirasi tetapi ada lagi *nih* yang yang mengklaim atau yang turun menemani. Karena turunnya Kementerian Desa, kami tentu memiliki nilai sebuah nilai itu, Pak, membuktikan bahwasanya betul ini aspirasi dari kami, Komisi V.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Syahrul.

Kayaknya bisa ini sesuai target, Pak Menteri. Oh, ada yang *nggak* terdaftar? Silakan Pak, ini rombongan liar.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan dan Anggota yang saya hormati,

Pertama, saya menitipkan dulu ke Pak Menteri tolong terlibat langsung di dalam revisi Undang-Undang Desa, Pak, karena itulah payung hukum sebentar yang kita jadikan dasar termasuk penentuan anggaran. Kenapa saya titipkan ini? karena terlalu banyak impian-impian yang kita harapkan di desa itu bisa terjadi ternyata tidak mampu dilakukan karena keterbatasan anggaran. Ditambah lagi semua anggaran yang diturunkan dan dikirimkan dari Menteri Keuangan, *mandatory* sifatnya semuanya, sehingga kepala desa itu tidak bisa berbuat fleksibel di dalam menggunakan anggaran dana desanya.

Ini menjadi catatan Pak Menteri, apapun yang kita bicarakan selama apalagi sekarang 2,7 triliun apa yang mau diperbuat, hanya begitu-begitu saja. *Nah*, oleh karena itu, saya mengharapkan bahwa keikutsertaan Pak Menteri seandainya revisi undang-undang ada di Komisi V dilakukan, mungkin kita bisa lakukan yang terbaik. Karena di Baleg maka mohon barangkali berikan pemikiran-pemikiran yang rasional di sana untuk bisa melihat bagaimana desa ke depan karena semua orang bicara desak Pak Menteri.

Saya apresiasi dan terima kasih ya dan dua kunjungan saya beberapa waktu yang lalu di aspek pengawasan BUMDes di Kulon Progo, BUMDes di Cirebon, semua memberikan hasil yang baik dan tanda-tanda kebaikan ekonomi ada di desa. Ini yang harus kita pikirkan, desa asal kepala desanya itu mau juga melihat BUMDes-nya maju karena kepala desa bisa memberikan modal penyertaan. Dengan adanya modal penyertaan ada PAD Desa, kira-kira seperti itulah. Bayangan kita ke depan itu BUMDes itu menggerakkan ekonomi desa sehingga pertumbuhan ekonomi di desa itu cukup tinggi nanti.

Di Cirebon, misalnya, pengelolaan sampah, peternakan, tapi saya menitikpkan bahwa mengelola BUMDes jangan semua bisnis itu diambil alih. Biarkanlah rakyat yang menjual *voucher*, jual apa segala macam jangan pikiran sama BUMD dulu semua mau diambil. Menjadi mitra kerja seperti apa yang saya sudah lihat, Pak Menteri, impian kita kan seperti itu. Tapi apa daya stimulan yang Bapak Menteri lakukan itu sangat-sangat terbatas ditambah ada *mandatory* lagi yang harus dilakukan. Ideal yang dikatakan oleh Pak Syahrul Aidi ideal sekali, tapi antara idealisme kita dengan kemampuan itu masih sangat jauh. Kita harus mencari sinergi di dalam revisi undang-undang itu nanti Undang-Undang Desa, itu bisa dimasukkan salah satu poin. Mungkin pikiran-pikiran Pak Menteri bisa arahkan ke sana.

Apa yang kita bahas pada hari ini tidak ada yang bisa kita, hanya menyatakan buat layanan terbaik dengan anggaran 2,7 triliun. *Nggak* bisa lagi, Pak, BUMDes misalnya hanya sekian ya itulah. Desa Wisata hanya 30 ya mau bagaimana, ayo.

Jadi, apa namanya ya, saya mengharapkan apa namanya optimalisasi semua anggaran yang ada, apalagi di dalam memasuki tahun politik ya. Saya kira Pak Menteri, saya tidak banyak komentar tetapi saya selama BUMDes ada ini, ada kebanggaan tersendiri di desa itu bahwa sudah ada lembaga ekonomi yang sifatnya permanen yang bisa meningkatkan pendapatan di daerah dan di desa khususnya. Saya kira itu saja Pimpinan mudah-mudahan dengan anggaran yang sekecil begini kita bisa manfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan kita semuanya.

Demikian.

Terima kasih, mohon maaf.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

F-PDIP (SRI RAHAYU):

Izin, Pimpinan, tambah satu poin saja.

KETUA RAPAT:

Boleh, Bu, silakan Bu.

F-PDIP (SRI RAHAYU):

Iya, menyambung apa yang saya sampaikan dan disampaikan Pak Hamka, sudah dekat tapi jauh ternyata, ya terkait dengan Desa Wisata, Pak. Saya jadi merasa sedih begitu ya. Ini saya punya surat dari Bupati Tulungagung ini. Kepadaanya Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan Kemendes PPDT RI, judulnya rekomendasi. Jadi isinya mereka menginginkan bantuan berupa Desa Wisata, yang diusulkan ada 27 titik desa. Saya jadi kalau di situ hanya 36 ini sudah kalau direalisasikan sudah habis itu untuk yang lain *nggak* ada. Kalau ini tidak direalisasi satu atau dua itu kan harapannya hilang semua begitu. *Nah*, oleh karena itu, menurut saya menjadi sangat penting bahwa anggaran itu perlu ditingkatkan begitu supaya, kenapa? artinya perlu diperbanyak untuk desa wisata ini karena memang betul seperti yang saya sampaikan itu sangat dibutuhkan *gitu*. Oleh karena itu, itu menjadi perhatian besar menurut saya, Pak Menteri karena memang betul-betul sekarang ini apa semangatnya luar biasa di desa-desa itu dan kreativitasnya juga cukup lumayan untuk desa-desa wisata kalau saya perhatikan.

Paling tidak, masyarakat yang tidak mampu pergi di tempat lain yang membutuhkan atau mengeluarkan banyak anggaran, itu bisa *refreshing* karena ini jamannya stress, Pak, stress di mana-mana. Orang ngelihat HP juga stress juga, *gak* bisa makan stress, *gak* bisa kemana-mana stres. *Nah*, oleh karena itu ini sangat penting menurut saya untuk direalisasikan.

Terima kasih, Pimpinan

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Bu.

Kayaknya stressnya semua sama deh, BUMDes dan desa wisata, Pak, soalnya Menteri Pariwisata juga agak agresif ke desa-desa untuk menjanjikan desa wisata. Pertanyaannya anggarannya dari mana nih? Dari Menteri Desa atau dari Menteri Pariwisata *gitu loh*. Jadi kalau itu memang merangsang daerah-daerah dan desa-desa untuk mengajukan diri sebagai penerima desa wisata *gitu loh*, Pak, akibat daripada Pak Menteri Pariwisata yang juga cukup agresif tadi yang maksud saya.

Dari teman-teman Anggota selesai dan *alhamdulillah* cukup lancar ini cukup cepat, Pak.

Dari kami memberikan apresiasi terhadap WTP yang diperoleh sudah enam kali berturut-turut ya, Pak Menteri, semoga ke depan semakin baik lagi dan ingin saya ingatkan menyangkut masalah serapan anggaran tahun 2023 ini sisa tiga bulan terakhir mungkin dan kemudian posisi kita masih cenderung agak rendah 51,56%. Semoga penyerapan kita di akhir tahun ini akan lebih maksimal.

Dan kemudian ada beberapa program kegiatan seperti jalan desa atau air bersih yang saya lihat hampir semua Direktorat Jenderal ini kalau bisa ada koordinasi antara Kementerian PUPR karena di PUPR juga itu ada program Sanimas dan Pamsimas, dan kemudian ada jalan, ada Program PISEW dan lain sebagainya yang kita khawatirkan jangan sampai program tersebut menjadi tumpang tindih dengan Kementerian Desa PDT.

Kemudian menyangkut masalah transmigrasi ya, saya cuma ingin menghimbau, Pak, bahwa kelayakan hidup para transmigran ini memang harus perlu diperhatikan dioptimalkan tentunya menyangkut masalah sarana-sarana kehidupan dan akses dan lain sebagainya. Selama ini kita melihat banyak dari ada beberapa mungkin transmigran yang kemudian meninggalkan tempat karena tidak melihat apa namanya prospek yang cukup panjang. Jadi kita berharap bahwa karena keberhasilan program transmigrasi itu kalau para transmigrannya bermukim dan menetap di tempat itu. Jadi yang perlu kita ingatkan agar supaya sarana dan prasarannya menyangkut masalah rumah, jalan, sarana air bersih, dan lain sebagainya itu betul-betul bisa dimaksimalkan.

Kemudian dari fungsi Inspektorat Jenderal, tentunya kita sama-sama memahami bahwa banyak kepala-kepala desa kita yang kemudian apa namanya terjebak dengan masalah-masalah hukum. Di HPH, kita harapkan bahwa fungsi Inspektorat Jenderal ini saya melihat di sini ada apa tadi, layanan investigasi khusus dan pengawasan penggunaan dana desa. Jadi mungkin bisa lebih dioptimalkan Pak Menteri, cuma kalau anggarannya cuma 1,35 miliar ya bagaimana lah dengan jumlah sekian puluh ribu desa itu. Pada dasarnya agar supaya peningkatan SDM desa ini bisa menjadi jadi inspektorat nya bisa menjadi pelindung sebenarnya pembinaan sifatnya sehingga kemudian mengurangi dampak-dampak negatif terutama dari sisi hukum terhadap kepala desa.

Baik.

Pak Menteri dari Anggota dan Pimpinan Komisi V DPR RI sudah menyampaikan pertanyaan ataupun pendapat.

Selanjutnya, kami akan mempersilahkan kepada Pak Menteri untuk memberikan jawaban. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Menteri.

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI (Dr. (H.C.) Drs. H. ABDUL HALIM ISKANDAR, M.Pd):

Terima kasih, Pak Ketua Sidang.

Ketua Rapat dan seluruh jajaran Pimpinan dan Anggota Komisi V,

Yang pertama saya mulai dari Pak Ketua Rapat. Penyerapan terima kasih diingatkan. Kemudian koordinasi dengan PUPR *Insyallah* terus kita lakukan karena kita memang *nggak* mau ada *overlapping* meskipun selama ini *nggak* pernah terjadi karena luasnya wilayah dan kecilnya program sehingga selalu saja *enggak* ada tumpang tindih. Kemudian transmigrasi memang kita betul-betul mempersiapkan untuk RPJP 2024-2045 karena ini terkait juga dengan perubahan regulasi. *Nah*, konsep yang kita coba sodorkan untuk RPJP adalah kepemilikan lahan komunal, ini satu.

Yang kedua teknologi pertanian, jadi tidak boleh lagi istilah saya itu tidak boleh lagi dibekali cangkul dan sabit tapi sudah harus sebuah sistem pengelolaan tanah yang mekanisasi pertanian sehingga bisa dipastikan kalau sudah terjun ya sudah mereka akan mendapatkan sesuatu yang diharapkan dari situ, sekaligus ini menjawab dari Ibu Sri Rahayu tadi bahwa kita terus berikhtiar agar transmigrasi tidak sama dengan memindahkan kemiskinan. Meskipun kita jujur masih kita temukan beberapa kasus yang memang permasalahan terkait dengan etos kerja. Jadi sudah kita dalam kenapa *kok* kemudian keluar dari kawasan trans kemudian pindah ke kota di lokasi itu, kemudian jual bakso jual ini dan seterusnya, jadi pedagang dan seterusnya ternyata kaitannya dengan etos kerja yang tidak cukup menyatu dengan alam yang memang sejak di sananya memang kurang pas kita di dalam melakukan pemetaan. Jadi memang masih ada beberapa permasalahan yang perlu ditangani serius di dalam transmigrasi.

Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati,

Terima kasih juga atas dukungan dan dan apresiasinya dengan diraihnya WTP, mudah-mudahan terus kita bisa tingkatkan dan saya sepakat bahwa WTP adalah sebuah kewajiban dan tidak ada urusannya WTP dengan korupsi sehingga tidak berarti kalau WTP sudah bisa terbebas dari korupsi *nggak* karena memang beda urusan. WTP terdiri dari sistem apa, system apa namanya sistem SPI/Sistem Pengendalian Internal/SPI, kemudian kepatuhan, dan ada tiga *item*. Sementara, urusan korupsi itu urusan terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh personal-personal yang tentu tidak ada urusannya dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan di situlah kemudian terjadi penyimpangan sehingga kita akan terus berupaya semaksimal mungkin paling tidak dengan WTP itu kontrol kita terhadap penggunaan uang menjadi lebih maksimal dan peluang untuk melakukan korupsi juga akan berkurang.

Itulah makanya di dalam penggunaan dana desa pun, kita selalu bicara tentang partisipasi masyarakat. Karena dengan partisi masyarakat, semakin tinggi partisipasi masyarakat celah untuk penyalahgunaan dana desa akan semakin kecil karena masyarakat akan mengawal mulai dari rencana kerja pembangunan desa sampai penyusunan APBDes, kemudian pelaksanaan pembangunan, bahkan bisa kita nyatakan bahwa di dalam sistem perencanaan dan pelaksanaan bangunan yang paling transparan, itu ada di desa. Karena

kalau di APBD saja itu *nggak* ada masyarakat bisa mengakses sementara di desa itu di tempel di tempat-tempat umum.

Nah, ini yang terus kita bangun kita pertahankan jangan sampai justru mengalami penurunan sehingga harapan yang kemudian ada di revisi, Draf Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 untuk terus ada kenaikan dana desa, ini harus ditopang dengan tingkat partisipasi yang tinggi, karena kalau partisipasi masyarakat tidak tinggi maka mengkhawatirkan sekali penyimpangan-penyimpangan terjadi dengan banyaknya dana desa yang disalurkan. *Nah*, di situlah dibutuhkan satu tahapan-tahapan yang sistematis tidak serta-merta dan mungkin di situ juga *reasoning* kenapa, apa masa jabatan kepala desa perlu didiskusikan, kayaknya sekarang sudah hampir memenuhi titik temu antara pemerintah dengan DPR terkait dengan masa jabatan kepala desa.

Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati,

Terkait dengan....

INTERUPSI F-PDIP (SRI RAHAYU):

Interupsi, Pimpinan

KETUA RAPAT:

Silakan, Bu,

F-PDIP (SRI RAHAYU):

Terkait dengan jabatan desa, Pak. Memang ini perlu dikaji secara mendalam, maksud saya begini. Dulu pernah 10 tahun ya, 10 tahun kemudian turun menjadi 8 apa 6 dulu tuh, 8, dua kali ya. Setelah itu turun lagi menjadi 6, 5 dulu ya 5 kemudian 6, sekarang 9 hampir mendekati 10.

Maksud saya supaya tidak terjadi seakan-akan kepentingan yang tersembunyi di situ, saya bukan bukan mempersoalkan 9 tahun ya *ndak* kita setuju. Tapi ini perlu dikaji secara mendalam supaya ke depan itu tidak akan terjadi lagi. Saya khawatir nanti setelah 9 turun lagi:“ wah kurang ini kalau hanya 2 periode”, turun menjadi 8 apa 7, 3 periode. *Nah*, hal-hal semacam itu menurut saya perlu betul-betul, Pak Menteri ikut di dalamnya di dalam mengkaji atau memberikan pertimbangan yang detail sehingga tidak terjadi perubahan-perubahan yang begitu cepat *loh*, itu cepat sekali perubahannya. Untuk kepentingan siapa? menurut saya itu tidak perlu dibahas kepentingannya tetapi sekali lagi mohon dengan hormat itu untuk dikaji. Karena kan alasan dari teman-teman kepala desa itu kan dua kali 9 tahun *tuh* dengan harapan tidak apa karena di desa itu kan pemerintahan yang kalau hanya 6 tahun itu antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya yang pro dan kontra itu susah untuk disatukan kembali.

Nah, oleh karena itu mohon dengan hormat ini pertimbangan yang 9 tahun ini bukan pertimbangan untuk tidak setujunya ya artinya pertimbangan-pertimbangan 9 tahun ini betul-betul dikembangkan, betul-betul digali secara dalam, supaya tidak menimbulkan nanti setelah 9 tahun tidak akan ada perubahan kembali.

Terima kasih, Pimpinan.

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI (Dr. (H.C.) Drs. H. ABDUL HALIM ISKANDAR, M.Pd):

Terima kasih.

Sepakat karena kita di dalam melakukan telaah selalu bertumpu pada kepentingan kesejahteraan, bukan pada kepentingan siapapun. Jadi selalu kita kembalikan ini kalau dalam konteks kesejahteraan masyarakat bagaimana. Itulah maknanya bicara tentang penambahan dana desa pun harus kita ikuti dengan pola peningkatan partisipasi masyarakat yang notabene belum maksimal, kita jujur belum maksimal. Artinya kepedulian warga masyarakat terhadap sebuah proses pembangunan yang sebenarnya sistemnya sudah sangat transparan tapi ini masih belum.

Misalnya, Musdes itu terbuka untuk umum, siapapun boleh hadir tapi masyarakat masih belum terlalu peduli. Kemudian dipampang di tempat-tempat strategis APBDes pertahun anggaran, itupun kritik masyarakat masih cukup rendah. *Nah*, inilah yang kita upayakan kita tingkatkan supaya pengawasannya menjadi lebih maksimal.

Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati,

Kemudian terkait dengan program-program utamanya desa wisata, BUMDes nanti *monggo* di... kita dalam lagi. Sebenarnya saya juga tanya itu kenapa *kok* lebih sedikit dari tahun kemarin lebih turun jumlahnya ke UK-1 satunya. Iya karena begini katanya karena Komisi V sudah *nggak* butuh sudah selesai Pemilu katanya begitu. Kan sudah selesai sudah pelantikan ini nanti itu.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Itu janji Pak Menteri, hari ini dia janji realisasi tahun depan.

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI (Dr. (H.C.) Drs. H. ABDUL HALIM ISKANDAR, M.Pd):

Oh, tahun depan iya iya iya. Iya *monggo* nanti disepakati yang pasti kita menyerahkan sepenuhnya untuk dibahas bersama-sama.

Kemudian terkait dengan Pak Syahrul Aidi banyak banget. Jadi kuncinya sebenarnya kan begini, Pak Syahrul, untuk terkait dengan variasi, terkait dengan ini prioritas penggunaan dana desa sepakat. Pada prinsipnya

Kementerian Desa dan saya secara pribadi memang tidak setuju dengan prosentase tetapi *mandatory* yang kemudian muncul dari itu misalnya kemarin ketahanan pangan diprosentase itu hasil pembicaraan antara Kementerian Keuangan dengan Banggar. Ya, sudah kita *nggak* bisa ngapa-ngapain misalnya kayak gitu sehingga itu harus kita masukan.

Nah, sekarang *alhamdulillah* urusan itu tidak lagi diwajibkan diharuskan tiap tahun sehingga menjadi lebih fleksibel. Kalau kemarin kan tiap tahun Kementerian Desa harus mengeluarkan Permendes tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, ini yang kemudian kadang-kadang sering jadi tempat untuk *mathok-mathok* itu. *Nah*, kalau tidak setiap tahun itu menjadi agak fleksibel. *Nah*, mudah-mudahan di 2024 ini kita tidak, Banggar dan Kementerian Keuangan. Kemudian yang 40% waktu itu yang dipermasalahkan juga itu Kementerian Keuangan. Jadi kita tidak pernah mematok tapi karena ada *mandatory-mandatory* seperti itu.

Nah, sementara narasi yang paling mendasar terkait dengan dana desa adalah ini dana APBN yang ditransfer ke desa. *Nah*, sehingga konstruksinya adalah kita mencoba untuk. *Nah*, itu ada ruang sebenarnya makanya di dalam sistem SDGs Desa yang kita bangun itu di situ. Saya selalu ngomong bagaimana kita membangun desa berbasis masalah, berbasis kebutuhan. *Nah*, agar itu bisa terwujud masalahnya diketahui kebutuhannya diketahui harus ada data, *nggak* mungkin kita tahu masalah tahu kebutuhan kalau tidak ada data. *Nah*, itulah yang sekarang kita bangun terus sampai hari ini.

Nah, sehingga ketika Pak Syahrul tadi tanya:”apa yang dilakukan oleh Kementerian Desa terkait dengan desa sangat tertinggal dan tertinggal?” Kita selalu memantau rekomendasi yang muncul. Jadi *artificial intelligence* dalam tanda kutip ya tidak secanggih yang dibayangkan, yang penting ketika data itu muncul ada, diisi maka akan ada rekomendasi-rekomendasi berdasarkan data yang masuk. Misalnya kemiskinan tinggi, maka prioritas utama dana desa digunakan untuk urusan kemiskinan, bentuknya apa dan seterusnya itu ada rekomendasi. *Nah*, kita ngawal itu, ngawal itu sehingga kita bisa memberikan arahan yang lebih intensif kepada para pendamping, kepala desa agar ini *loh* kondisi desa *sampeyan* tolong prioritas dana desa untuk ini, ini, ini supaya cepat tertuntaskan.

Yang kedua, kita terus melakukan koordinasi dengan kepala daerah karena tidak mungkin desa sangat tertinggal dan tertinggal itu bisa naik sendiri tanpa ada intervensi APBD. Misalnya bicara tentang ketersediaan tenaga kesehatan, bidan, dokter, dan nakes. Ini tidak mungkin bisa diwujudkan oleh desa tanpa ada intervensi kegiatan misalnya kursus, ada pasar desa, kantor pos, dan jasa logistik dan seterusnya kedekatan dengan akses BPR dan lain-lain ini, ini yang terus kita komunikasikan dengan pemerintah daerah.

Nah, *alhamdulillah* terjadi percepatan, *InsyaAllah* tahun ini kita sudah memenuhi RPJM kita tahun 2023 ini sudah memenuhi RPJM kita sehingga kalau nanti 2024 *InsyaAllah* sudah *surplus*. Terkait dengan itu tetapi perlu saya laporkan bahwa itu baru kerangka makro, indeks desa membangun itu

kerangka makro. *Nah*, mikronya SDGs desa karena di situ bicara tentang desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, pendidikan desa berkualitas, keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa, ini mikronya di situ. Jadi nanti ke depan itu rekomendasi kita di RPJP adalah indeks desa membangun ini makronya karena dalam konteks desa tanpa kelaparan, itu bisa tanpa melihat mandiri atau tertinggal, tanpa melihat itu. Dimungkinkan kita menemukan di desa sangat tertinggal tidak ada kelaparan karena tanahnya subur, petaninya giat, dan seterusnya. Memang infrastrukturnya jelek tapi orang-orangnya sehat kecukupan gizinya ada karena memang misalnya itu. Tapi ada yang juga tempatnya bagus, gizi tercukupi, tapi banyak *stunting*. Misalnya nelayan yang hasil tangkapannya tidak dimakan tapi dijual kemudian beli indomie. *Nah*, ini banyak kasus kita temukan di desa-desa pesisir. Makanya kita selalu bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk literasi hidup sehat dan seterusnya.

Nah, tentu terkait dengan konsep prioritas penggunaan dana desa. Kami tidak menutup diri untuk mendapatkan masukan dari Komisi V bisa di nanti bisa dibahas bersama-sama sebagai masukan karena *final*-nya bukan di kita sendiri ada lintas kementerian di Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan. Jadi Kementerian Desa tidak bisa berdiri sendiri dalam konteks ini. Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas ada, oh Kumham Karo-an itu kan (*suara kurang jelas*) jadi Bappenas, ini yang juga ikut ambil. Makanya kita senang ketika tidak tiap tahun karena tiap tahun pasti itu tarik-menariknya pada pemanfaatan. Kita draf utamanya kita draf utamanya kita.

Saya ingin jadi seperti Pak Syahrul jadi Anggota DPR saja. Kalau diizinkan Bu Wahyu. Sementara itu BUMDesa. Betul, Pak, kita berikhtiar betul Pak Hamka dan kita selalu mengatakan pertama BUMDesa jangan hanya... *nggak* kepada kepala desa jangan hanya menutup BUMDesa untuk PADS/ Pendapatan Asli Desa, jangan. Yang penting BUMDesa memberi dampak pada pertumbuhan ekonomi, itulah makanya kita membagi BUMDesa menjadi dua: BUMDesa yang melakukan upaya usaha untuk produktif dan BUMDesa yang bersifat konsolidatif. Dia tidak dapat untung apa-apa, yang penting masyarakat terbantu itu yang saya sebut sebagai BUMDesa Konsolidatif.

Nah, oleh karena itu, hari ini kita juga sudah membangun terkoneksi dengan LKPP untuk *e-katalog* produk BUMDesa sehingga pemerintah daerah ketika butuh air minum, butuh ini, butuh ini yang sudah diproduksi oleh BUMDesa dan masuk *e-katalog* aman untuk beli tanpa harus lelang dan seterusnya. Itu sedang kita proses dan mudah-mudahan LKPP bisa merekomendasi beberapa BUMDesa sedang dalam penelaahan sehingga nanti kita bisa belanja, pemerintah daerah utamanya ini kan untuk pemerintah daerah atau pemerintah kita sendiri dari Kemendes dan ini sudah bertahun-tahun di Kemendes. Saya haramkan bahkan *haram mughallazah* meskipun itu tidak ada, Pak, *haram mughallazah*, memanfaatkan produk-produk di luar produk UMKM dan BUMDesa. Mulai dari air mineralnya, makanannya, dan seterusnya meskipun dulu, mohon maaf, ada ini tapi sekarang *nggak* ada, Pak, sekarang di Komisi V saja masih ada di sini.

Saya kira demikian Bapak-Ibu sekalian. Nanti yang lain-lain akan kita sampaikan misalnya tentang *feasibility* tadi pertanyaan itu apa namanya bangunan perhutanan sosial. Itu satu paket apa-apa, Pak, itu kan ada *output*-nya apa nanti kita sampaikan secara tertulis.

Terima kasih, Pak Ketua, mohon maaf.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Menteri.

Bapak-Ibu sekalian,

Demikian tanggapan dari Bapak Menteri Desa PDT dan Transmigrasi. Dan sesuai ketentuan tata tertib Pasal 293, kita akan merumuskan kesimpulan atau keputusan rapat kerja pada hari ini untuk disepakati dan kita tandatangani bersama. Saya akan membacakan kesimpulannya. Draf kesimpulannya ya.

DRAF KESIMPULAN RAPAT KERJA KOMISI V DPR RI DENGAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI SELASA, 29 AGUSTUS 2023.

1. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terhadap hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat LKPP Tahun 2022 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Selanjutnya, Komisi V DPR RI meminta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk meningkatkan kinerja dan mempertahankan capaian opini tersebut di tahun mendatang.
2. Komisi V DPR RI memahami penjelasan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terhadap alokasi anggaran Kementerian dalam RAPBN Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN Kepala Bappenas Nomor: S-626/MK.02/2023 dan B.644/M.PPM/D.8/PP.04.02.07/2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Pagu Anggaran Belanja K/L TA 2024 sebagai berikut:

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk pagu kebutuhan 4 triliun 700 maaf 4 miliar 744 ini dalam ribuan rupiah, Pak, ini jadi Rp4.744.518.054.000,00 dan dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.757.268.382.000,00. Terdapat selisih sebesar Rp1.987.249.672.000,00. Selanjutnya Komisi V DPR RI bersama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi akan memperjuangkan kenaikan anggaran sesuai

pagu kebutuhan melalui mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN di DPR RI.

3. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi agar:
 - a) Menyesuaikan alokasi pagu Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan usulan dan saran Komisi V DPR RI;
 - b) Menambah alokasi anggaran untuk bantuan pengembangan BUMDes dan desa wisata;
 - c) Berperan aktif pada revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - d) Prioritas penggunaan dana desa tahun 2024 harus sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa.

Pak Menteri, apakah dapat disetujui kesimpulan tersebut?

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI (Dr. (H.C.) Drs. H. ABDUL HALIM ISKANDAR, M.Pd):

Yang poin D saja.

KETUA RAPAT:

Poin D.

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI (Dr. (H.C.) Drs. H. ABDUL HALIM ISKANDAR, M.Pd):

Ya, menurut saya prioritas penggunaan dana desa tahun 2024 memberi ruang seluas-luasnya untuk disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa. Karena kalau di sini harus sesuai itu seakan-akan kita, *nggak* mungkin itu 74.000 terus kita harus sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa kan *nggak* mungkin.

Terima kasih

KETUA RAPAT:

Iya, baik, Pak Menteri.

Bapak-Ibu Anggota, setuju? apakah dapat disetujui? Oke.

(RAPAT: SETUJU)

Pimpinan Anggota Komisi V DPR RI, dan Menteri yang kami hormati,

Dengan telah disepakatinya kesimpulan dan keputusan tersebut maka rangkaian acara rapat kerja pada hari ini telah kita selesaikan.

Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama berlangsungnya rapat.

Sebelum rangkaian acara rapat hari ini ditutup, kami akan memberikan kesempatan kepada Pak Menteri untuk menyampaikan sambutan penutup sebagai Menteri Perhubungan bukan sebagai Caleg ya, Pak.

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI (Dr. (H.C.) Drs. H. ABDUL HALIM ISKANDAR, M.Pd):

Terima kasih, Pak Ketua.

Para Pimpinan dan Anggota Komisi V yang saya hormati,

Terima kasih, hari ini telah kita sepakati beberapa hal sesuai dengan kesimpulan rapat dan tentu masih akan ditindaklanjuti untuk pembahasan-pembahasan yang lebih detail dan termasuk menyampaikan jawaban secara tertulis untuk hal-hal yang memang harus kita lengkapi dengan data.

Yang terakhir, terima kasih atas apresiasi, dukungan, dan arahan selama ini dan mudah-mudahan akan terus berlanjut.

Demikian.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Waalaikumsallam warahmatullahi wabarakatuh.

Bapak-Ibu yang kami hormati,

Rangkaian acara rapat pada hari ini telah kita selesaikan, semoga hal-hal yang telah kita diskusikan dan kita putuskan dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara, aamiin.

Dengan ucapan *alhamdulillah*, rapat kerja pada hari ini kita tutup dengan ucapan terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

(RAPAT DITUTUP PUKUL 17.42 WIB)

JAKARTA, 29 Agustus 2023
a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

TTD

NUNIK PRIHATIN BUDIASTUTI, S.H.
NIP. 196912021998032002